

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini meneliti pengaruh antara kualitas tata kelola pemerintah yang diukur sebagai lemahnya kualitas tata kelola yaitu dari total temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan, dan kualitas laporan keuangan yang diukur dengan opini audit BPK terhadap tingkat korupsi di pemerintah provinsi Indonesia. Penelitian kuantitatif ini menggunakan 34 provinsi selama periode 2015 – 2023 yang menghasilkan 306 sampel penelitian dengan analisis regresi data panel dan memilih *Fixed Effect Model (FEM)* sebagai model yang sesuai. Variabel korupsi diukur dari total kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, KPK, dan Kepolisian.

Hasil penelitian secara parsial, lemahnya kualitas tata kelola hampir berpengaruh signifikan terhadap kasus korupsi yang membuat hipotesis pertama diterima. Hasil yang mendekati signifikan ini ditandai karena adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi korupsi, misalnya budaya politik, kekuatan elit lokal, penegakan hukum, dan hubungan antara pusat dan daerah yang tidak terukur dalam model. Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan yaitu teori agensi dan sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa semakin lemahnya tata kelola, membuat kesempatan dan celah untuk melakukan penyelewengan di dalam pemerintah yang dapat menimbulkan kasus korupsi semakin meningkat.

Sedangkan, untuk kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi yang menyebabkan hipotesis kedua ditolak. Temuan ini menimbulkan sebuah pertanyaan apakah opini BPK memang dapat mencerminkan kualitas pelaporan di pemerintah provinsi. Hal ini berarti karena terdapat 289 dari 306 pemerintah provinsi yang WTP, sedangkan hasil opini ini tidak menjamin kualitas laporan keuangan dan gagal meminimalisir korupsi. Terbukti pada kasus Jawa Timur, terdapat 64 kasus korupsi di tahun 2023

padahal hasil audit yang didapatkan adalah opini WTP. Untuk lemahnya tata kelola yang diproksikan dari hasil temuan audit dapat dilihat dari banyaknya jumlah temuan di DKI Jakarta. Dominasi temuan pada bidang aset menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola keuangan di pemerintah provinsi DKI Jakarta bersifat struktural. Ketidaktertiban penatausahaan, lemahnya pengamanan, dan minimnya transparansi atas aset daerah tidak hanya menurunkan kualitas pengendalian internal, tetapi juga menciptakan ruang korupsi yang sistemik dan berkelanjutan dalam pengelolaan kekayaan publik. Temuan ini menyimpulkan bahwa lemahnya pengelolaan di bidang aset menyebabkan korupsi. Hal ini dapat dijadikan peringatan untuk pengawasan lebih ketat bagi pemerintah provinsi yang banyak temuannya. Selain itu, variabel kontrol PDRB dan belanja daerah juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap korupsi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan untuk beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah provinsi

Penelitian ini menyarankan agar pemerintah provinsi tidak hanya berfokus pada perolehan opini WTP semata, karena terbukti opini tersebut tidak menjamin bebas dari korupsi. Adapun yang dapat dilakukan seperti penguatan sistem digitalisasi, segala proses mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pengadaan dilakukan secara integrasi penuh melalui sistem sehingga menutup celah *moral hazard* serta mengurangi interaksi fisik yang dapat membuka peluang penyuapan. Selain itu, optimalisasi penerapan *whistleblowing system* (WBS) yang menjamin kerahasiaan pelapor untuk mendeteksi kecurangan di lingkungan pemerintahan.

2. Bagi masyarakat dan investor

Penelitian ini menyarankan untuk masyarakat perlu meningkatkan partisipasi pengawasan publik dengan aktif memantau dan melaporkan indikasi penyimpangan yang terjadi di lingkungan pemerintah melalui aplikasi pengaduan resmi seperti LAPOR! atau JAGA.ID milik KPK, dan komunitas antikorupsi lokal seperti Indonesian Corruption Watch. Selain

itu, bagi investor dapat melakukan *due diligence* yang lebih mendalam untuk menanamkan modal di pemerintah provinsi. Tidak hanya mempertimbangkan opini audit dan temuannya, tetapi juga mempertimbangkan hal lain seperti survei persepsi korupsi di wilayah tersebut sebagai indikator risiko investasi untuk memastikan kepastian hukum dan keamanan modal.

3. Untuk penelitian selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain, seperti mempertimbangkan aspek fraud triangle dalam pemerintah provinsi, karena dalam penelitian ini ternyata membuktikan bahwa aspek dari kualitas laporan keuangan dan kualitas tata kelola pemerintah provinsi saja tidak mencukupi untuk menanggulangi tingkat kasus korupsi yang ada.